

Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dalam Perspektif Hukum Internasional

Muhammad Zulfikar, 2110412039

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hukum Internasional

Dalam interaksi suatu negara di lingkup internasional, setiap negara memiliki faktor kepentingannya masing-masing atau yang biasa disebut kepentingan nasional. Kepentingan nasional bertujuan untuk melindungi kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran negaranya dalam sistem internasional. Kepentingan nasional biasanya dibentuk oleh sejarah, lokasi geografis, dan prioritas domestik suatu negara. Kepentingan ini mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Kepentingan nasional selalu menjadi faktor penentu tentang bagaimana suatu negara bertindak melalui kebijakan luar negerinya. Namun, meskipun negara-negara memiliki hak yang melekat untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran mereka, sangat krusial bahwa kepentingan suatu negara tetap berada dalam batas-batas prinsip hukum internasional. Negara-negara dapat memajukan kepentingan mereka dengan tetap mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan oleh komunitas internasional, sehingga perdamaian, stabilitas, dan keadilan global dapat terwujud. Di masa yang ditandai dengan keterkaitan, ketergantungan, dan keberpihakan antar negara, keselarasan antara kepentingan nasional dan hukum internasional sangat penting untuk tatanan dunia yang aman.

Operasi militer yang dilakukan Rusia terjadi pada menjelang pagi 24 Februari 2022 dimana Rusia meluncurkan invasi jalur darat, air, dan udara skala penuh melalui serangan misil jarak jauh dan pesawat tempur yang menargetkan sejumlah kota besar di Ukraina. Pasukan darat Rusia menyerbu masuk ke Ukraina dalam waktu singkat, menguasai sebagian besar wilayah negara itu dan mengepung kota Kiev. Kejadian tersebut menandai eskalasi yang tajam dari konflik berkepanjangan antara kedua negara tersebut, yang dimulai ketika peristiwa aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Rusia menargetkan infrastruktur sipil di daerah perkotaan dan padat penduduk. Serangan invasi awal Rusia merusak peralatan militer Ukraina, daerah pemukiman perkotaan, dan infrastruktur komunikasi dan transportasi. Selain itu, gedung-gedung apartemen dan rumah sakit menjadi target pengeboman dan penembakan. Sejak dimulainya invasi, dilaporkan lebih dari 3,3 juta orang telah mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman di Polandia. Beberapa negara barat terutama Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan senjata kepada Ukraina.

Pertemuan darurat Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Maret diadakan, 141 dari 193 negara anggota PBB memberikan suara untuk mengecam invasi Rusia dan menuntut agar Rusia segera meninggalkan Ukraina. Masyarakat internasional bereaksi dengan cepat untuk mengutuk tindakan Rusia. Rusia dikeluarkan dari Dewan Eropa, Rusia dituntut ganti rugi atas kerusakan, aset Rusia senilai triliunan dolar telah dibekukan, beberapa bank Rusia ditolak aksesnya ke SWIFT, maskapai penerbangan Rusia tidak diizinkan menggunakan wilayah udara mereka, beberapa produk Rusia tidak dapat diekspor, banyak bisnis yang berhenti berbisnis di Rusia, dan Jerman berhenti menyetujui pipa gas Nord Stream 2 milik Rusia, dan aksi negara-negara lain yang ikut serta mengecam tindakan Rusia. Sejak saat itu, nilai tukar rubel jatuh, dan sanksi-sanksi ini berdampak buruk pada perekonomian Rusia.

Salah satu motivasi di balik strategi militer Rusia untuk menginvasi Ukraina adalah untuk menjaga keamanan negara dan penduduknya yang berada dalam bahaya. Rusia memiliki hak untuk mempertahankan semua kepentingannya serta negara dan bangsa Rusia. Kebijakan luar negeri Rusia menyatakan bahwa segala bentuk perluasan dan ekspansi aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat akan dianggap Rusia sebagai tindakan agresi. Perluasan aliansi NATO terutama di Eropa Timur dan negara-negara tetangga Rusia menunjukkan bahwa aliansi pertahanan ini semakin mendekati batas-batas Rusia dan berkembang menjadi "ancaman eksternal" bagi Rusia. Ekspansi NATO akan memicu konflik militer antara Barat dan Rusia. Kedua negara adidaya ini akan berebut pengaruh, yang akan

mengacaukan atmosfer hubungan internasional di antara negara-negara Eropa. Karena itu menurut Rusia, ekspansi NATO ke Eropa Timur akan berdampak negatif pada keamanan di wilayah tersebut. *National insecurity* dari pihak Rusia berdasar pada situs-situs rudal anti-balistik yang telah dan sedang dibangun di beberapa negara dekat Rusia seperti Rumania dan Polandia oleh NATO. Dan secara geografis, jika Ukraina terlibat bergabung dengan NATO, akan berkemungkinan bahwa rudal NATO akan ditempatkan di perbatasan Rusia-Ukraina. Putin berpendapat bahwa Ukraina berada dibawah naungan Rusia dan mereka adalah satu bangsa. Rusia yang merasa telah dikepung oleh negara-negara aliansi NATO kemudian menggunakan semua cara yang diperlukan untuk menunjukkan kekuatannya untuk bertahan, yaitu dengan melakukan invasi ke Ukraina.

Dilihat dari hukum internasional, Invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan di bawah Pasal 2(4) Piagam PBB. Pengecualian untuk larangan ini yaitu penggunaan kekuatan untuk membela diri. Argumen Putin yang menyatakan bahwa tindakan Rusia adalah upaya pembelaan diri dari negara aliansi NATO tidak dapat dibuktikan karena Ukraina bukanlah pihak yang melakukan serangan bersenjata. Berdasarkan hukum internasional, klaim Rusia yang tidak berwujud ini tidak cukup sebagai alasan untuk sikap antisipasi membela diri. Invasi Rusia ke Ukraina tidak memiliki pembenaran, merupakan penggunaan kekuatan dan kekerasan yang ilegal, dan merupakan sebuah aksi agresi, dan melanggar hukum internasional.

Keterlibatan Belarus juga dipertimbangkan dalam aspek hukum internasional karena pasukan serangan jalur darat Rusia ke Ukraina masuk secara masif melalui wilayah utara Belarus. Dengan mengizinkan Rusia menggunakan wilayahnya untuk melakukan tindakan agresi, Belarus telah melanggar hukum internasional sesuai dengan doktrin tanggung jawab negara. "Membantu atau bersekongkol dengan tindakan yang salah dari negara lain adalah melanggar hukum internasional", menurut Pasal 16 dari Artikel Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional.

Asas persamaan dan kedaulatan dalam hukum internasional menjadi kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Tindakan invasi Rusia ke Ukraina mempresentasikan ketidakhormatan Rusia atas kedaulatan Ukraina. Invasi tersebut juga menyerang dan menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah termasuk fasilitas umum dan warga sipil, melanggar hak asasi manusia dan hukum perang dalam hukum humaniter. Meskipun hukum internasional penting dalam penanganan konflik ini, terutama ketika masyarakat internasional membutuhkan forum dan sarana penegakan hukum yang memiliki akuntabilitas, aspek hukum dan aturan perang cukup lemah penerapannya. Rusia hingga saat ini belum menghentikan invasi dan belum menarik pasukan militernya dari Ukraina.

Referensi

- Channel 4 News. (2022). *Russia Ukraine conflict: Putin launches full-scale invasion*. <https://youtu.be/aCOekp64He8?si=90sN5SVoPv9XIWsV>
- Malik, Ayesha. (2022). *The Russian Invasion of Ukraine and International Law*. Research Society of International Law. <https://rsilpak.org/2022/the-russian-invasion-of-ukraine-and-international-law/>